



Media Title	Investor Daily		
Head Line	2014, Tender Kontraktor Tol Cisumdawu Tahap II Digelar		
Date	28 Nov 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	6	Article Size	
Journalist	Eko Adityo Nugroho	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

2014, Tender Kontraktor Tol Cisumdawu Tahap II Digelar

Oleh Eko Adityo Nugroho

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum akan memulai tender kontraktor pengerjaan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) tahap kedua pada pertengahan 2014. Proses tender dibuka apabila progres pengadaan lahan mencapai 75%.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto mengungkapkan, pembiayaan pengerjaan jalan tol ini tetap akan menggunakan pinjaman dari Tiongkok sebesar Rp 1 triliun. Adapun pinjaman ini akan dicairkan pada tahun depan sekitar US\$ 230.000 untuk pengerjaan tahap kedua.

"Pinjamannya kan sudah ada. Pinjaman ini seperti payung, kami tinggal ambil sedikit-sedikit untuk mengerjakan jalan tol Cisumdawu," tutur dia di Jakarta, baru-baru ini.

Proyek jalan tol Cisumdawu ini akan dikerjakan dalam enam seksi. Seksi I Cileunyi-Tanjungsari 9,8 kilometer (km), seksi II Tanjungsari-Sumedang (17,51 km), seksi III Sumedang-Cimalaka (3,7 km), seksi IV Cimalaka-Legok (6,96 km), seksi V Legok-Ujungjaya (16,35 km), dan seksi VI Ujungjaya-Dawuan (4 km).

Jalan tol sepanjang 60,28 km tersebut nantinya akan tersambung dengan tol Cikampek-Palimanan yang saat ini juga tengah dikonstruksi. Jalan bebas hambatan ini juga menjadi akses menuju ke Bandara Kertajati yang saat ini masih dalam proses pembaharuan. Waktu tempuh dari Bandung ke Sumedang juga makin singkat dari 2 jam menjadi sekitar 15 menit.

Djoko mengatakan, infrastruktur ini sudah mulai dikerjakan sejak Oktober 2012 untuk seksi satu. Pengerjaan di seksi satu ini dilakukan oleh Shanghai Contractor Group, PT Wiyava Karva, dan PT Waskita Karva dan

diharapkan bisa tuntas pada 2014. "Hingga saat ini progres pengerjaannya sudah 40%, sedikit terganggu akibat ada permasalahan lahan," tutur dia.

Namun begitu, pengerjaan bisa dilakukan karena proyek ini tidak melibatkan perbankan dalam hal pendanaan. Dengan demikian, proses konstruksi bisa terus berjalan sambil menuntaskan persoalan-persoalan yang menghambat pengerjaan. "Kontraktor juga tidak terganggu, karena bisa memilih pekerjaan yang tanahnya tidak bermasalah," tutur Djoko.

Pada seksi satu ruas tol Cisumdawu, lahan yang mesti dibebaskan mencapai 95 hektare (ha). Dari jumlah itu, sekitar 94,6 ha telah bebas dan tinggal menyisakan 0,4 ha lahan yang tengah diupayakan untuk dibebaskan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan tersebut.

Butuh Rp 1,4 Triliun

Adapun secara total lahan yang mesti dibebaskan untuk pembangunan tol Cisumdawu seluas 1.140 hektare (ha) dengan asumsi kebutuhan biaya mencapai Rp 1,4 triliun. Proses pembebasan lahan tersebut tengah dilakukan dan dimulai dengan mengidentifikasi status lahan, bangunan, dan tanaman.

Kepala Seksi Pengadaan Tanah Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Sri Sadono sebelumnya mengungkapkan, total lahan yang mesti dibebaskan untuk seluruh seksi

tol Cisumdawu itu mencapai 1.140 ha. Luas lahan yang mesti dibebaskan ini meningkat dari sebelumnya hanya 850 ha karena ada perubahan akses, penguatan jalan di lereng bukit, serta pengerukan lahan.

"Asumsi kebutuhan biaya untuk pembebasan lahan itu sekitar Rp 1,4 triliun. Jumlah ini bisa bertambah ataupun berkurang, tergantung dari proses negosiasi di lapangan dengan masyarakat," ungkap dia.

Dari total kebutuhan biaya pembebasan lahan itu, sambungnya, yang sudah direalisasikan sekitar Rp 218 miliar untuk membayar ganti rugi lahan di seksi I dan II tol tersebut. Adapun sumber pendanaannya sebagian berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sekitar Rp 111 miliar dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebanyak Rp 107 miliar. "Itu baru di seksi I dan II saja. Seksi-seksi lain belum dibebaskan seluruhnya," imbuh dia.

Sri menambahkan, proses pembebasan lahan untuk seluruh seksi ruas tol Cisumdawu tersebut akan dilakukan oleh panitia pengadaan tanah (P2T) dan tim pembebasan tanah (TPT) yang dipimpin oleh pemerintah daerah setempat. Proses tersebut sudah bisa dilakukan mulai saat ini dengan mengidentifikasi status tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) di daerah.

"Identifikasi dilakukan dengan melihat status tanah, bangunan, dan tanaman. Itu dilakukan dengan melibatkan instansi terkait, seperti Kementerian Kehutanan, BPN, dan Kementerian Pekerjaan Umum," ujar dia.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Achmad Gani Ghazali menambahkan, seiring dengan pembangunan di seksi satu dan dua, proses pembebasan lahan untuk seksi tiga hingga empat akan dilakukan. Setelah 75% lahan itu bebas, proses tender akan dilakukan untuk menggandeng swasta mengerjakan jalan bebas hambatan ini. "Jadi, prosesnya masih panjang, kemungkinan tahun 2016 atau 2017 sudah bisa beroperasi seluruhnya," pungkas dia.